

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa hubungan antar Negara semakin dekat serta membawa dampak yang positif dan negatif bagi suatu Negara. Salah satu akibat dari globalisasi adalah berkembangnya pusat-pusat industri yang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Perkembangan pembangunan di berbagai aspek dan industri setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini akan terjadinya penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran baik dari desa ke kota ataupun antar daerah. Bertambahnya tenaga kerja tersebut maka terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota atau daerah yang membutuhkan tenaga kerja dan hal ini juga akan menyebabkan permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi penduduk itu sendiri.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009;67). Permasalahan sampah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu penambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat yang menyebabkan timbunan sampah yang sangat tinggi, jumlah kendaraan pengangkut yang kurang memadai, sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan. Karena tidak seimbangnya

sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara ekonomis masalah sampah juga berkaitan dengan persoalan retribusi sampah. Masalah yang sering dijumpai adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang sadar untuk membayar retribusi sampah.

Permasalahan sampah terjadi di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Tumpukan sampah di pinggir jalan dan di sungai banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat Desa Teja. Semakin hari sampah semakin menumpuk.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) TEJA PERCEKA di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka baru berdiri pada tahun 2019, yang dilatar belakangi cita-cita dan keinginan besar Kepala Desa, Perangkat, Lembaga Desa dan Tokoh serta masyarakat setempat yang dalam satu kesepakatan melalui musyawarah desa (MUSDES) yang melihat kesempatan Dana yang masuk ke kas desa dan diperbolehkan oleh undang-undang mempergunakan dana untuk kemajuan ekonomi desa dan yang paling utama yaitu potensi yang dimiliki oleh desa yang begitu besar sehingga terjadi

kesepakatan untuk memberikan wadah yang mampu untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya dengan nama BUMDes ini sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan modal Bangunan Tempat Pengelolaan Sampah yang diberikan sebagai tempat bekerja mengelola sampah utamanya dari warga desa Teja untuk dikelola sehingga mengatasi masalah sampah yang menghantui warga desa. Selain itu warga akan difasilitasi untuk dijadikan nasabah Bank Sampah yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh semua warga. Selain memberikan solusi tetapi BUMDes harus memberikan manfaat yang besar bagi warganya.

Kemampuan pendanaan dari suatu organisasi (BUMDes) untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat vital. Dana yang sangat besar selain diperlukan untuk membayar belanja pegawai, juga diperlukan dalam rangka pembiayaan operasional penyelenggaraan kegiatan dan program dari BUMDes tersebut.

Sistem retribusi kebersihan bisa menjadi alternatif untuk pembiyaan dari kegiatan pengelolaan sampah oleh BUMDes, yang berupa pungutan atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemeritahan kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan Perdes Desa Teja Nomor 08 tahun 2019. Selama ini penetapan target penerimaan retribusi kebersihan tidak didasarkan pada potensi yang ada, dan tidak didasarkan pada pencapaian realisasi di lapangan.

Masyarakat belum sadar akan tanggung jawab untuk membayar biaya retribusi. Dari data 1015 Kartu Keluarga hanya 400 yang dapat membayar biaya Retribusi.

Selain mengelola Unit Retribusi Kebersihan BUMDes juga mengelola Unit Pariwisata yang ada di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yaitu obyek Wisata Curug Tonjong. Untuk membandingkan pendapatan BUMDes yang bersumber dari unit retribusi kebersihan dan unit pariwisata dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Retribusi Kebersihan

No	Bulan	Pendapatan
1	januari	Rp. 5.126.000
2	Februari	Rp. 3.972.400
3	Maret	Rp. 3.810.000
4	April	Rp. 4.145.000
Jumlah		Rp. 17.053.000

Sumber : BUMDes Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka

Tabel 1.2
Pendapatan Pariwisata

No	Bulan	pendapatan
1	Januari	Rp. 7.582.000
2	Februari	Rp. 3.900.000
3	Maret	Rp. 4.100.000
4	Juli	Rp. 5.398.000
Jumlah		Rp. 20.980.000

Sumber : BUMDes Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka

Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan dari unit pariwisata lebih besar dibandingkan dengan unit retribusi kebersihan. permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **‘Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan BUMDes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka’**

1.2 Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan BUMDes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka belum Optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?

- b. Apa saja hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?
- c. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?

1.4 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Bumdes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ?

1.5 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan serta dapat mengaplikasikan ilmu dari teori yang telah dipelajari khususnya tentang Implementasi Kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, Khususnya tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan peneliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan.
- b. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak Bumdes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

1.6 Kerangka pemikiran

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa :
Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Meter dan Hom dalam Winarno (2014:149) membatasi kebijakan sebagai berikut :

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha- untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya Winarno (2014:25) menyatakan bahwa:

Keputusan kebijakan (*policy statement*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan

kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adaah menetapkan undang-undang, memberikan perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interperetasi yuridis terhadap undang-undang. Friedrich dalam Winarno (2014:20) mendefinisikan bahwa :

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones White bahwa Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi daripada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja.

Mc Queen (1998) mengungkapkan bahwa :

“suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dsimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tariff kebersihan harus tetap dilakukan.

Menurut Undang_Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis menyeluruh dengan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keberhasilan Implementasi kebijakan juga ditentukan oleh banyak variable atau factor, dan masing-masing variabel saling berhubungan satu sama lain.

Edwards III dalam Subarsono (2013:90-92) mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu :

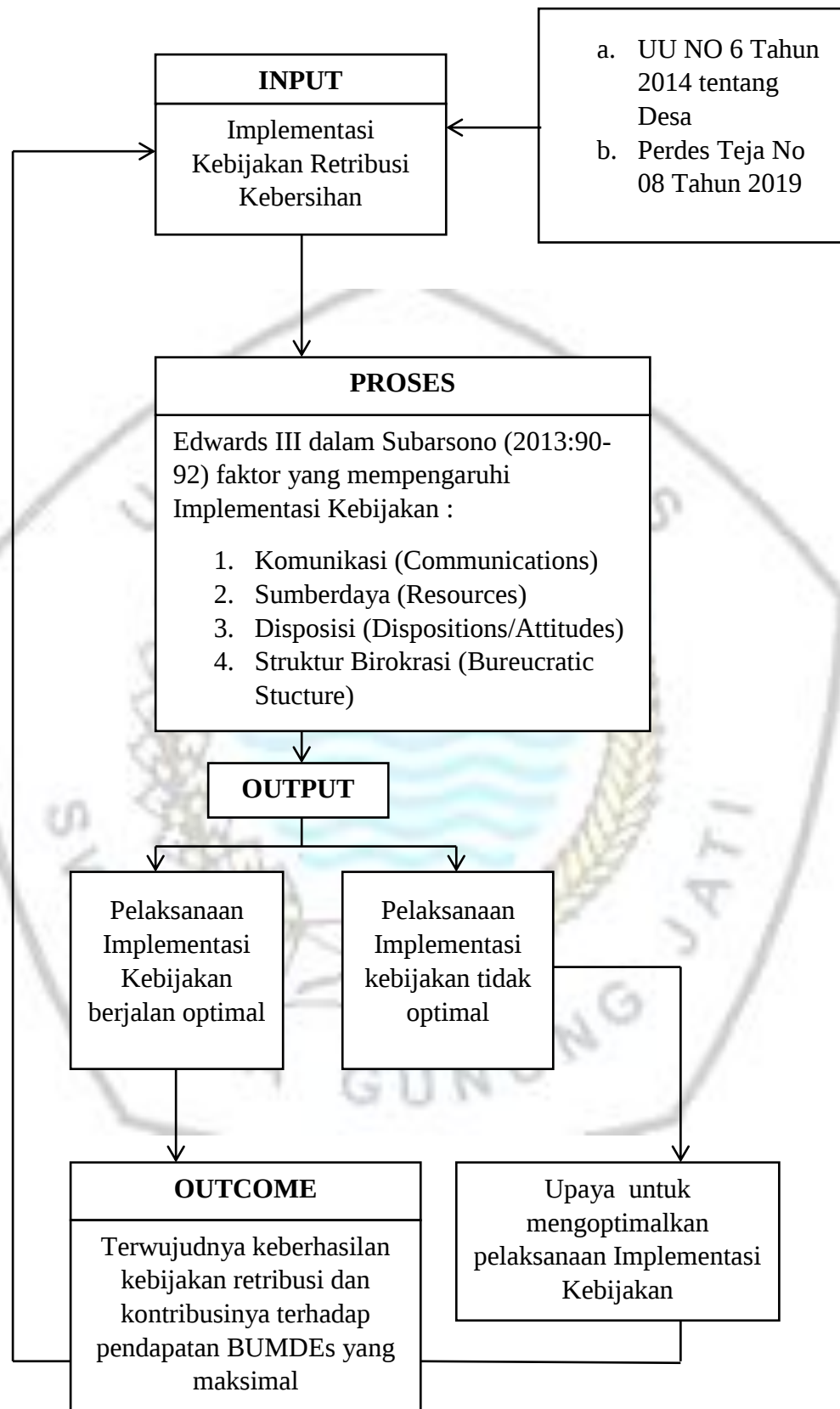
- 1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- 2) Sumberdaya
Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah factor pening untuk Implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
- 3) Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedur atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan dan kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes di desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dapat dilakukan sesuai indikator keberhasilan kebijakan, maka

kegiatan dari system pelaksanaan di BUMDes dapat berjalan dan selain itu pengelolaan sampah dapat mengurangi timbunan sampah dan dapat menghasilkan kenyamanan dan keindahan serta lingkungan yang bersih. Dalam mengimplentasikan kebijakan retribusi kebersihan sangat diperlukan adanya komunikasi yang jelas baik antar individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan sumberdaya yang memadai, prilaku aparatur bertanggung jawab atas tugasnya dan kewajibanya, serta struktur birokrasi yang tidak berbelit-belit.

Berikut ini adalah pola kerangka pemikiran dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi kebersihan dan kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes di desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.





1.7 Definisi Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Konsep penelitian

- a. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)

(Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2014:148)

- b. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. (Winarno, 2014:39)
- c. Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi daripada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja. (Sproule-Jones White)
- d. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir (sejati, 2009:24)
- e. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia. (Manik 2009:67)

- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) TEJA PERCEKA baru berdiri pada tahun 2019 tahun ini, yang dilatar belakangi cita-cita dan keinginan besar Kepala Desa, Perangkat, Lembaga Desa dan Tokoh serta masyarakat setempat yang dibulatkan dalam satu kesepakatan bulat melalui musyawarah desa (MUSDES) yang melihat kesempatan Dana yang masuk ke kas desa dan diperbolehkan oleh undang-undang mempergunakan dana untuk kemajuan ekonomi desa dan yang paling utama yaitu potensi yang dimiliki oleh desa yang begitu besar sehingga terjadi kesepakatan untuk memberikan wadah yang mampu untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya dengan nama BUMDes ini sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
- g. Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2013:90-92)	Komunikasi	1. Transisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumberdaya	1. Staff 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Kepatuhan Pelaksana 2. Intensif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standard Operating procedure (SOP)</i> 2. Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode penelitian yang digunakan

Menurut Lincoln dalam Moloeng (2005:5) menyatakan bahwa :

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian Kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan.

Sugiyono dalam Pasolong (2013:161) mengemukakan bahwa :

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variabel pada obyek diteliti bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang “Implentasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka”.

1.8.2 Imforman dan teknik Pemilihan Imforman

Sampel atau Imforman yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan Imforman yaitu dengan cara *purposive sampling* artinya pengambilang sampel atau imforman dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Imforman-imforman dalam penelitian ini, yaitu

a. Imforman kunci, yaitu :

1. Direktur BUMDes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

b. Imforman Pendukung, yaitu :

1. Petugas pengangkut sampah di TPS Desa Teja
2. Petugas penagih Retribusi kebersihan
3. Masyarakat yang diminta biaya Retribusi kebersihan

1.8.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Sugiyono (2017:225) mengemukakan bahwa :

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menurut (Sugiyono, 2017:226-240) meliputi :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

2. Study Lapangan

Study lapangan dilakukan dengan dua teknik yaitu :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan key Imformation (informasi kunci).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Pasolong 2013 : 70)

1. Data primer yakni menggunakan metode wawancara kepada Imforman yaitu pengumpulan data dengan cara melakukn wawancara kepada yang berkepentingan.
2. Data Sekunder, dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penulis sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, study kepustakaan, melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.
3. Dokumentasi, dengan mengambil dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan

dokumen dalam bentuk gambar / foto relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya. Terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. (sugiyono, 2017:267)

Sugiyono (2017:270) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : “*credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (objektifitas)”.

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi. Wiersma dalam sugiyono (2017 : 273) menyatakan bahwa : “*Triangulation is qualitative cross- validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures* (Triangulasi adalah validasi silang kualitatif. Jika menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi dari beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data ”.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Alasan penulis melakukan teknik triangulasi adalah dengan teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang dipeoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut

dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017:246-252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credible*.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BUMDes desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Alasan memilih tempat ini :

1. Adanya masalah yang perlu diteliti
2. Adanya data yang mendukung
3. Lokasi penelitian yang terjangkau

1.9.2 jadwal Penelitian

penulis melakukan penelitian sampai terselesaikannya hasil penelitian dan dapat dilihat pada table berikut :

